



**LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA OPD APBD TA. 2025
S/D TRIWULAN IV (RENSTRA 2021-2026)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
(Gedung C-2 lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompak Seri Darul Makmur
Pos-el : desdm@kepriprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan IV APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan ini ditulis untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dijalankan pada Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan dalam segi penyajiannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk penyempurnaan laporan ini.

Tanjungpinang, Februari 2026

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197303330 199302 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah	4
BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	5
BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
3.1. Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	8
3.2. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	11
3.3.Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	11
3.4.Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah	12
BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RENJA	
4.1. Capaian Target Indikator Sasaran	13
4.2. Capaian Target Indikator Program	15
4.3. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan	18
BAB V KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	24
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	25
6.2. Rekomendasi	25

Lampiran: Matrik Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembentukan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepri Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Kedudukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disingkat DESDM Provinsi Kepri, merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi di bidang Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap tahun DESDM Provinsi Kepri menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja dalam 1 (satu) tahun kedepan Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun $n+1$ dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra OPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Perangkat daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah). Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah provinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Dasar Hukum

Sebagai sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepri APBD Tahun Anggaran 2025, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang beberapa kali telah dimuktahirkan terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 - 3406 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017).

1.3. Maksud dan Tujuan

Agar kegiatan yang terdapat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dapat diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, berkelanjutan dan bermanfaat, maka maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepri APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

➤ Maksud

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepri APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

➤ Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepri APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- c. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Adapun metode penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau ini disusun dengan metode evaluasi sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renjayang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

B A B II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai dan rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses Perencanaan Strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Indikator Kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klarifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (**input**), keluaran (**output**), hasil (**outcomes**), manfaat (**benefits**) dan dampak (**impacts**). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, untuk indikator hasil, manfaat dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahapan perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat merupakan kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Selanjutnya dapat dilihat tujuan dan sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2025
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat	Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	%	98,80	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	98,80
			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	100
			Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	100
		Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	15,9	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	15,9
2	Pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	Persentase daerah aliran sungai yang memiliki potensi cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota	%	81,82	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase daerah aliran sungai yang memiliki potensi cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota	81,82
3	Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (<i>good mining practice</i>)	Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	228,60	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	228,60

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
		Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	45		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	45
4	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP	BB	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase capaian indikator kinerja bidang urusan	BB

B A B III

PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN
DPA, RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

3.1 Jumlah Program dan Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Perangkat Daerah

Jumlah Program dan Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Renstra , Renja dan DPA Tahun 2025

No	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENSTRA	RENJA	DPA
I	3.29.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	√	√	√
1	3.29.01.1.01	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	√	√	√
1	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	√	√	√
2	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	√	√	√
3	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√
2	3.29.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	√	√	√
4	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	√	√	√
5	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	√	√	√
6	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	√	√	
7	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	√	√	√
3	3.29.01.1.05	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	√	√	√
8	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√	√	√
9	3.29.01.1.05.0005	Monitiring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	√	√	
10	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	√	√	
4	3.29.01.1.06	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	√	√	√
11	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√
12	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	√	√	√
13	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	√	√	√
14	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√
15	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordiansi dan konsultasi SKPD	√	√	√
5	3.29.01.1.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	√	√	√
16	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	√	√	√
17	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	√	√	√
6	3.29.01.1.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	√	√	√

Perbandingan Jumlah Program dan Kegiatan DPA, Renja dan Renstra

No	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENSTRA	RENJA	DPA
18	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√
19	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	√	√	√
20	3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√
21	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√
II	3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	√	√	√
7	3.29.02.1.01	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	√	√	√
22	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	√	√	√
23	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	√	√	
24	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	√		
8	3.29.02.1.03	Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	√	√	√
25	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	√	√	√
26	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	√	√	
27	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	√	√	
III	3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	√	√	√
9	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	√	√	
28	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	√	√	
29	3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	√	√	
30	3.29.03.1.04.0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	√	√	
10	3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	√	√	
31	3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WilayahIzin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	√	√	

No	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENSTRA	RENJA	DPA
32	3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	√	√	
11	3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	√	√	
33	3.29.03.1.13.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	√	√	
34	3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	√	√	
12	3.29.03.1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	√	√	
35	3.29.03.1.14.0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	√	√	
36	3.29.03.1.14.0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	√	√	
13	3.29.03.1.15	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	√	√	
37	3.29.03.1.15.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	√		
38	3.29.03.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	√	√	
14	3.29.03.1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	√	√	√
39	3.29.03.1.16.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	√	√	√
40	3.29.03.1.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	√	√	
15	3.29.03.1.24	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	√	√	√
41	3.29.03.1.24.0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	√	√	√
42	3.29.03.1.24.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	√		
43	3.29.03.1.24.0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan	√	√	√
IV	3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	√	√	√
16	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	√	√	
44	3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa	√	√	

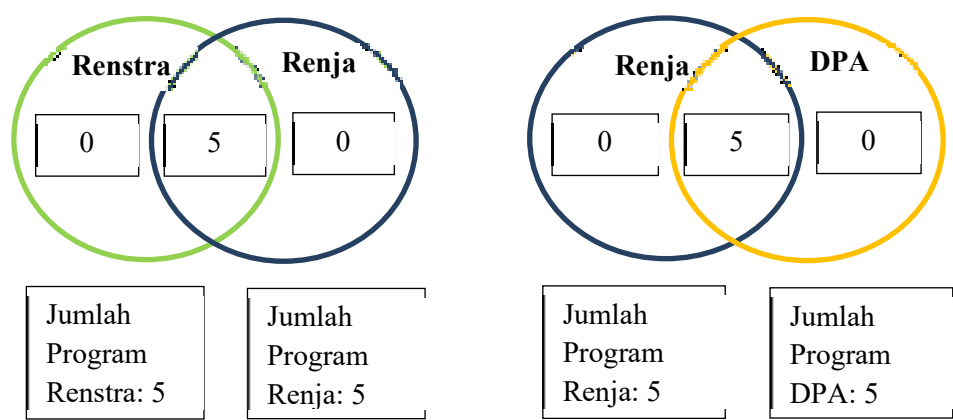
No	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENSTRA	RENJA	DPA
45	3.29.05.1.05.0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	√		
17	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	√		
46	3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	√		
18	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	√	√	√
47	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	√	√	
48	3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	√	√	
49	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	√		
50	3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	√	√	
51	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	√	√	√
52	3.29.05.1.07.0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT	√		
53	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	√	√	√
54	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	√		
19	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	√		
55	3.29.05.1.08.0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	√		
56	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	√		
20	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	√	√	√
57	3.29.05.1.10.0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	√		
58	3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	√		
59	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	√	√	
60	3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	√	√	√
V	3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	√	√	√
21	3.29.06.1.01	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	√	√	√
61	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	√	√	√

No	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENSTRA	RENJA	DPA
62	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	√	√	√
22	3.29.06.1.02	Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	√	√	√
63	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	√	√	√
64	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	√	√	√
23	3.29.06.1.04	Kegiatan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	√	√	
65	3.29.06.1.04.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	√	√	
66	3.29.06.1.04.0002	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	√	√	
67	3.29.06.1.04.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	√	√	
24	3.29.06.1.05	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	√	√	√
68	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	√	√	√
69	3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	√	√	√
25	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	√	√	√
70	3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	√	√	√

No	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	RENSTRA	RENJA	DPA
71	3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	√	√	√
72	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	√	√	√
73	3.29.06.1.06.0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	√	√	√

3.2 Perbandingan Jumlah Program Renstra, Renja dan DPA Perangkat Daerah

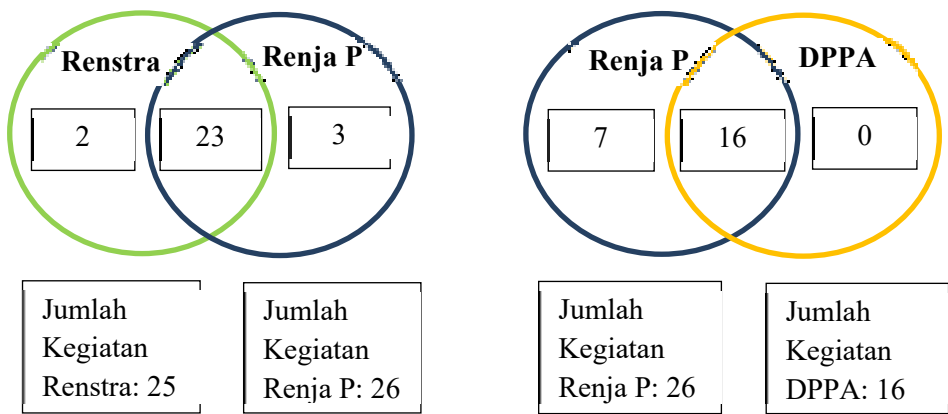
Dari tabel 3.1 tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara program Renstra, Renja dan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau melalui Irisan Perbandingan Jumlah Program Renstra, Renja dan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :



Terdapat 5 program dalam Renstra, 5 program dalam Renja dan 5 Program yang ada di DPA TA 2025, terlihat 5 program DPA yang konsistensi didalam program renja.

3.3 Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Perangkat Daerah

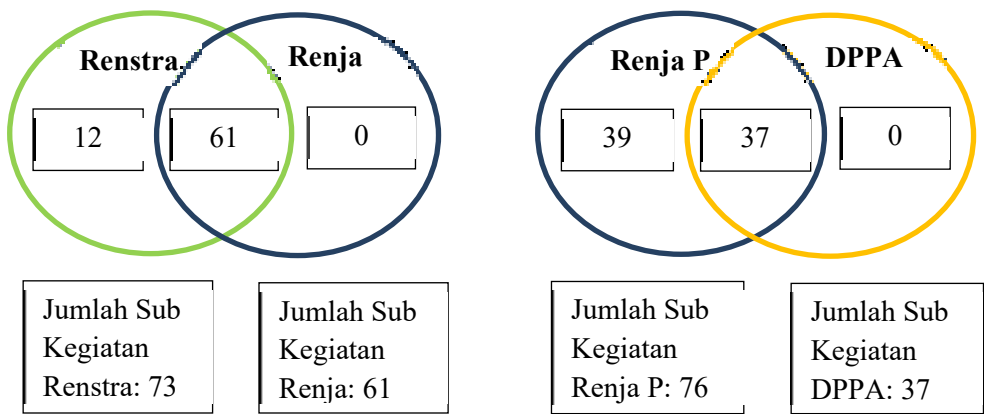
Dari tabel 3.1 tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara kegiatan dalam Renstra, Renja dan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau melalui irisan Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :



Terdapat 25 kegiatan dalam Renstra, 26 kegiatan dalam Renja dan 16 kegiatan yang ada di DPA TA 2025, terlihat 16 kegiatan dalam DPA yang konsistensi didalam kegiatan renja .

3.4 Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Perangkat Daerah

Dari tabel 3.1 tersebut diatas dapat dijelaskan perbandingan antara kegiatan dalam Renstra, Renja dan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau melalui irisan Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :



Terdapat 73 Sub kegiatan dalam Renstra, 76 Sub Kegiatan dalam Renja P dan 37 Sub Kegiatan dalam DPPA TA 2025, terlihat 37 Sub kegiatan dalam DPA yang konsistensi didalam kegiatan Renja .

B A B IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN RENJA

4.1 Capaian Target Indikator Sasaran

Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi s/d TW. IV Tahun 2025	% Capaian Target
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat	Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	%	98,80	99,21	101%
			Rasio Desa Berlistrik	%	100	99,76	99,76%
			Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100	100	100%
		Meningkatnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	15,9	15,9	100%
2	Pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan	Persentase daerah aliran sungai yang memiliki potensi cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota	%	81,82	81,82	100%
3	Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (<i>good mining practice</i>)	Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	228,60	228,6	100%
		Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	45	45	100%
4	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Nilai SAKIP	Bobot	BB	BB	100%

Adapun capaian atas target indikator kinerja sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat, serta pengelolaan air tanah dan sumber daya mineral secara berkelanjutan
 - Sasaran meningkatnya pemanfaatan sumber daya energi secara berkelanjutan dengan

indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

- a. Capaian indikator rasio elektrifikasi rumah tangga sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar 99,21%, capain indikator ini adalah capaian akhir tahun 2025 yang sifatnya akumulasi target pertahunnya, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 101% dari target indikator kinerja sasaran tahun 2025 sebesar 99,21%.
 - b. Capaian pada indikator Rasio Desa Berlistrik sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar sebesar 99,76%, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 99,76% dari target kinerja sasaran tahun 2025 sebesar 99,76%.
 - c. Program yang mendukung indikator pada Sasaran Meningkatkan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik yaitu Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
 - d. Indikator Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan, dengan capaian realisasi nol persen dikarenakan belum dilakukan pengawasan pada triwulan IV tahun 2025. Adapun program yang mendukung yaitu Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi, Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi dan Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
- Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Energi Baru Terbarukan dengan capaian indikator Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Dalam Bauran Energi (*Energy Mixed*). Dengan rumusan Jumlah Konsumsi Energi Baru Terbarukan dibagi jumlah Konsumsi Energi secara umum dikali 100, untuk persentase kinerja indikator dengan target 15,9 % sampai dengan triwulan IV.
 - Sasaran Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan dengan realisasi indikator Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah Provinsi pada Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Air Tanah sampai dengan triwulan IV yaitu sebesar 81,82%. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% dari target indikator kinerja sasaran tahun 2025 sebesar 81,82%.
2. Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*) dengan Sasaran:
 - Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral dengan target 228,60 Milyar Rupiah belum terealisasi sampai dengan Triwulan IV.
 - Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis dengan target 45% Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar 45% dengan

persentasi capaian kinerja sebesar 100%.

3. Sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan target nilai SAKIP BB pada tahun 2025 dengan program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi belum terealisasi.

Dari hasil evaluasi, capaian terhadap target indikator sasaran tahun 2025 sampai dengan triwulan IV yang belum maksimal atau belum mencapai target yang telah ditentukan, maka akan di evaluasi kembali pada triwulan berikutnya.

4.2 Capaian Target Indikator Program

Capaian Target Kinerja Indikator Program Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pencapaian Target Kinerja Indikator Program

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi s/d TW.IV Tahun 2025	% Capaian Target
1.	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	%	98,80	99,21	101%
		Rasio Desa Berlistrik	%	100,00	99,76	99,76%
		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100,00	100	100
2.	Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (<i>Energy Mixed</i>)	%	15,9	15,9	100
3.	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	%	81,82	81,82	100%
4.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	228,60	228,6	100
		Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	45	45	100%

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi s/d TW.IV Tahun 2025	% Capaian Target
5.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	Bobot	BB	BB	100

Adapun capaian atas target kinerja indikator program tahun 2025 sebagai berikut :

1. Rasio Elektrifikasi merupakan jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) dibanding dengan jumlah total rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun sampai dengan tahun 2025 jumlah rumah tangga yang memakai tenaga listrik (baik PLN maupun Non-PLN) yaitu sebesar 639.744 rumah tangga dibanding dengan jumlah total rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yakni 644.866 rumah tangga dengan persentase sebesar 99,21%. Dari target kinerja tahun 2025 yakni 98,80% diperoleh persentase capaian target kinerja sasaran 101%.
2. Rasio desa berlistrik yang merupakan tingkat perbandingan jumlah rumah desa yang memakai tenaga listrik dengan jumlah desa total di suatu wilayah. Sampai dengan tahun 2025 jumlah rumah desa yang telah memakai tenaga listrik PLN yakni 418 desa/kelurahan dengan jumlah desa total sebesar 419 desa/kelurahan dengan persentase sebesar 99,76%. Sehingga diperoleh persentase capaian target kinerja sebesar 99,76% dari target kinerja sasaran tahun 2025 sebesar 100%.
3. Indikator persentase pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan yaitu jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha ketenagalistrikan antara lain Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik (IOPTL) pengendalian dan pengawasan Izin Operasi Pembangkit Tenaga Listrik, Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) sampai dengan triwulan IV belum terealisasi.
4. Indikator persentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (*Energy Mixed*) merupakan persentase Jumlah Konsumsi Energi Baru Terbarukan dibagi jumlah Konsumsi Energi secara umum, untuk persentase capaian kinerja indikator tersebut diukur pada akhir periode tahun 2025. Adapun perhitungan pembangkit energi baru terbarukan tersebut berasal dari pembangkit tenaga surya dan biomassa (PLTBM). Selain itu, pencapaian indikator persentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (*Energy Mixed*) tersebut juga disebabkan adanya update data Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan khususnya PLTS Komunal dan ditambah data pendukung yaitu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Adapun kendala Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Dalam Bauran Energi Sektor Kelistrikan yaitu masih rendahnya pembangunan infrastruktur pembangkit Energi Baru Terbarukan dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang menggunakan bahan bakar konvensional (gas dan diesel).
5. Indikator persentase Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah Dalam Daerah

Provinsi merupakan jumlah pengolahan data dan informasi cekungan air tanah pada wilayah sungai di dalam daerah Provinsi. Jumlah wilayah sungai di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 11 wilayah sungai, yang telah diidentifikasi pada cekungan air tanah 8 wilayah sungai sampai dengan tahun 2025 berdasarkan lokasi wilayah sungai di Kota Tanjungpinang (3 lokasi di Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari), Bintan (2 lokasi di Bintan Utara dan Bintan Timur), Karimun (2 lokasi di Kundur, Karimun Besar) dan Lingga (1 lokasi di Dabo Singkep) dengan persentase 81,82 % dengan capaian realisasi sebesar 100 % dari target indikator kinerja program tahun 2025 sebesar 81,82%.

6. Indikator Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau dengan target 228,60 Miliar Rupiah sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar 228,6 Milyar dengan capaian realisasi sebesar 100 %.
7. Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis dengan target 45% sampai dengan Triwulan IV terealisasi sebesar 45% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Dari hasil evaluasi, capaian terhadap target indikator program tahun 2025 sampai dengan triwulan IV yang belum maksimal atau belum mencapai target yang telah ditentukan, akan menjadi bahan evaluasi pada triwulan berikutnya.

4.3 Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Capaian Target Kinerja Indikator Sub Kegiatan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pencapaian Target Kinerja Indikator Sub Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Kinerja s/d TW. IV Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025	
		DPA P	Realisasi	Target	Realisasi	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	61.751.380,44	61.360.400	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	99,37	ST	ST
2	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	31.780.030	31.538.200	1 Laporan	1 Laporan	100,00	99,24	ST	ST
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.962.800	49.434.800	1 Laporan	1 Laporan	100,00	98,94	ST	ST
4	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10.324.028.860	9.922.255.246	71 Orang/Bulan	71 Orang/Bulan	100,00	96,11	ST	ST
5	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	378.369.920	355.644.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	93,99	ST	ST
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	63.617.442,16	63.165.518	1 Laporan	1 Laporan	100,00	99,29	ST	ST
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.016.000,00	3.496.500	1 Paket	1 Paket	100,00	87,06	ST	T
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.582.196	83.534.300	1 Paket	1 Paket	100,00	61,16	ST	R
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.707.800	9.525.909	1 Paket	1 Paket	100,00	98,13	ST	ST

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Renja

No	Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Kinerja s/d TW. IV Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025	
		DPA P	Realisasi	Target	Realisasi	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
10	Penyediaan bahan logistik kantor	33.344.795	31.401.051	1 Paket	1 Paket	100,00	94,17	ST	ST
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48.975.000	48.893.098	1 Paket	1 Paket	100,00	99,83	ST	ST
12	Penyelenggaraan rapat koordiansi dan konsultasi SKPD	278.938.800	249.504.600	1 Laporan	1 Laporan	100,00	89,45	ST	T
13	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	34.004.100	31.028.765	1 Laporan	1 Laporan	100,00	91,25	ST	ST
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	617.884.548	610.596.308	1 Laporan	1 Laporan	100,00	98,82	ST	ST
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.162.504	165.189.200	9 Unit	9 Unit	100,00	93,24	ST	ST
16	Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	31.340.000	22.550.000	30 Unit	30 Unit	100,00	71,95	ST	S
17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	1 Unit	1 Unit	100,00	100,00	ST	ST
18	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.081.600	-	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	SR	SR
19	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	29.594.000	28.917.900	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	97,72	ST	ST
20	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	42.880.000	41.843.700	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	97,58	ST	ST

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Renja

No	Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Kinerja s/d TW. IV Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025	
		DPA P	Realisasi	Target	Realisasi	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
21	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.521.300	25.521.300	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	100,00	ST	ST
22	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	21.309.600	19.012.100	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	89,22	ST	T
23	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	538.343.800	533.894.200	1 Laporan	1 Laporan	100,00	99,17	ST	ST
24	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan Pertambangan	60.393.600	53.447.700	1 Laporan	1 Laporan	100,00	88,50	ST	T
25	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	24.234.413.050,00	16.859.755.920	712 Unit	720 Unit	101,12	69,57	ST	S
26	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	1.355.406.574	1.263.498.574	1 Unit	1 Unit	100,00	93,22	ST	ST

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Renja

No	Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Kinerja s/d TW. IV Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025	
		DPA P	Realisasi	Target	Realisasi	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
27	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	309.232.400	105.925.000	1 Laporan	1 Laporan	100,00	34,25	ST	SR
28	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7.761.000	5.415.800	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	69,78	ST	S
29	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	12.160.000	9.175.300	1 Laporan	1 Laporan	100,00	75,45	ST	S
30	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	7.261.000	7.150.000	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	98,47	ST	ST
31	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	12.165.000	9.198.600	1 Laporan	1 Laporan	100,00	75,62	ST	S
32	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	6.221.000	3.889.300	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	62,52	ST	R

Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Renja

No	Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian Kinerja s/d TW. IV Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja s/d TW. IV Tahun 2025	
		DPA P	Realisasi	Target	Realisasi	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
33	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	8.213.000	7.474.900	1 Laporan	1 Laporan	100,00	91,01	ST	ST
34	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	313.944.400	225.570.200	73 Keluarga	73 Keluarga	100,00	71,85	ST	S
35	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	9.809.000	6.708.900	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	68,40	ST	S
36	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6.632.649.719	6.515.805.416,49	3 Unit	3 Unit	100,00	98,24	ST	ST
Total		46.006.620.418	37.517.314.106			97,25%	81,55 %	Sangat Tinggi	Tinggi

Berdasarkan tabel 4.3 Realisasi capaian kinerja sub kegiatan sangat tinggi, sedangkan Realisasi anggaran kategori Tinggi disebabkan beberapa paket pekerjaan mengalami tunda bayar.

B A B V

KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan bulan Desember 2025 (Triwulan IV) Tahun Anggaran 2025 adalah Realisasi anggaran yang tidak optimal atau kategori Tinggi disebabkan sejumlah paket pekerjaan mengalami tunda bayar.

B A B VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Evaluasi Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sampai dengan triwulan IV telah terlaksana semaksimal mungkin, dengan total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu :

- Capaian Kinerja Program = **98,17 %** (Sangat Tinggi)
- Capaian Kinerja Kegiatan = **84,52 %** (Tinggi)
- Capaian Kinerja Sub Kegiatan = **97,19 %** (Sangat Tinggi)
- Capaian Realisasi Keuangan = **81,55 %** (Tinggi)

Dapat dilihat bahwa Capaian realisasi Keuangan pada TW IV belum Optimal, namun demikian capaian realisasi keuangan dengan Kategori Tinggi sampai dengan bulan Desember 2025 karena ada sejumlah paket pekerjaan mengalami Tunda Bayar.

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sampai dengan triwulan IV ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang ingin dicapai dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di triwulan berikutnya.

6.2 Rekomendasi

Dengan tersusunnya Evaluasi Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sampai dengan triwulan IV ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai sampai dengan tahun berikutnya, sehingga untuk kedepannya Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja. Adapun Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk Renja Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yaitu dengan lebih fokus terhadap program-program yang strategis, meningkatkan kinerja SDM pada Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin menyelesaikan program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih kecil. Untuk program dan sub kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan agar kiranya menjadi evaluasi di triwulan berikutnya.

No	Tujuan/ Sasaran/ Renstra	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan pada Tahun 2024-2026		Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) Renja 2025	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025						Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)	Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025 (n)		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (n)		Unit Peran gkat Daera h Panan	Perma salaha n yang Dihad api							
						5					6		7			7.b				IV	12=8+9+10+11	13=12/7*100	13a		14=6+12			15=11/5*100%						
						1	2				2a	3	4	4a	K					Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																															
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																															
	Tujuan		Dinas Energi dan Sumber Daya Miner	Indikator Tujuan																			SR											
	Meningkatkan kualitas tata kelola			Nilai SAKIP Dinas ESDM	Bobot	BB		BB			Bobot	BB		BB		BB																		
	Sasaran			Indikator Sasaran				BB				BB																						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Dinas Energi dan Sumber Daya Min		Nilai SAKIP Dinas ESDM	Bobot	BB		BB			Bobot	BB		BB		BB							SR											
		3.29.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100		40.801.849.598	100	38.084.533.269		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100		13.517.449.678	100	12.515.946.247	100	12.344.547.775		3.286.928.989	100,00	11.764.117.895	89,29	95,30		T	ST	200	49.848.651.164	200,00	122,17	
		3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	12		1.450.000.000	7	976.546.780		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Dokumen	4		400.000.000	3	278.089.806	3	143.494.210	1	98.768.800	3	142.333.400	100,00	99,19		ST	ST	10	1.118.880.180	83,33	77,16	
		3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	12		350.000.000	4	94.733.700		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4		100.000.000	1	99.266.216	1	61.751.380		60.858.400	1	61.360.400	100,00	99,37		ST	ST	5	156.094.100	41,67	44,60	
		3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12		550.000.000	6	545.324.380		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	4		150.000.000	2	79.830.390	1	31.780.030		5.947.500	1	31.538.200	100,00	99,24		ST	ST	7	576.862.580	58,33	104,88	
		3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	12		550.000.000	5	336.488.700		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		150.000.000	4	98.993.200	1	49.962.800	1	31.962.900	1	49.434.800	100,00	98,94		ST	ST	6	385.923.500	50,00	70,17	
		3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan	%	100		29.799.580.971	136	28.165.882.891		Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan	%	100		9.933.193.657	100	9.754.495.108	100	10.766.016.222		2.836.071.792	25	10.341.064.764	25,00	96,05		SR	ST	161	38.506.947.655	161,00	129,22	
		3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	120		28.103.980.971	76	26.805.374.507		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / Bulan	40		9.367.993.657	37	9.116.863.852	71	10.324.028.860	71	2.723.863.792	71	9.922.255.246	100,00	96,11		ST	ST	147	36.727.629.753	122,50	130,68	
		3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi ASN	Dokumen	12		1.232.100.000	6	906.971.200		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	4		410.700.000	4	501.746.000	1	378.369.920	1	112.208.000	1	355.644.000	100,00	93,99		ST	ST	7	1.262.615.200	58,33	102,48	
		3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	Laporan	3		13.500.000				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1		4.500.000		-		-							SR	SR						
		3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	12		450.000.000	6	453.537.184		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	4		150.000.000	4	135.885.256.00	1	63.617.442.16	1	-	1	63.165.518	100,00	99,29		ST	ST	7	516.702.702	58,33	114,82	
		3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai	Paket	3		660.000.000	2			Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Pegawai	Paket	1		270.000.000	1	140.831.000,00	1	4.016.000,00	1,00	3.496.500	1	3.496.500	100,00	87,06		ST	T	3	3.496.500	100,00	0,53	
				Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Kantor	Laporan	2						Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Kantor	Laporan	1		150.000.000			1	1,00		1		100,00			ST							
				Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai	Orang	42			6			Tersedianya Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai	Orang	14		50.000.000			1	1,00		1		100,00			ST							
		3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3		210.000.000	49	170.072.000		Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut kelengkapan	Paket	1		70.000.000	1	140.831.000,00	1	4.016.000,00	1	3.496.500	1	3.496.500	100,00	87,06		ST	T	50	173.568.500	1666,67	82,65	
		3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi	Laporan	2		300.000.000				Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Laporan	1		150.000.000												SR	SR					
		3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	42		150.000.000	27	94.480.200		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	14		50.000.000				0	-								SR	SR	27	94.480.200	64,29	62,99
		3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		3.357.268.627	100			Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		1.089.256.021	100	485.719.953	100	507.548.591	###	242.730.777	100	422.858.958	100,00	83,31		ST	T	200		200,00	0,00	
		3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6		260.000.000	17	586.119.035		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2		80.000.000	1	37.975.420	1	136.582.196	1	6.249.300	1	83.534.300	100,00	61,16		ST	R	18	669.653.335	300,00	257,56	
		3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	Paket	6		72.851.846				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	2		20.000.000	1	18.127.783	1	9.707.800	1	7.527.909	1	9.525.909	100,00	98,13		ST	ST	1	9.525.909	16,67	13,08	
		3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	Paket	12		270.000.000	18	249.061.838		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4		75.000.000	1	33.344.795	1	33.344.795	1	16.487.870	1	31.401.051	100,00	94,17		ST	ST	19	280.462.889	158,33	103,88	
		3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	6		224.000.000	15	201.243.085		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2		52.000.000	1	42.000.000	1	48.975.000	1	27.893.098	1	48.893.098	100,00	99,83		ST	ST	16	250.136.183	266,67	111,67	
		3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		2.530.416.781	155	2.863.955.417		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4		862.256.021	2	354.271.955	1	278.938.800	1	184.572.600	1	249.504.600	100,00	89,45		ST	T	156	3.113.460.017	1300,00	123,04	

No	Tujuan/ Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan pada Tahun 2024-2026		Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2024 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) Renja 2025	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025										Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)	Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025 (n)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (n)	Unit Peran gkat Daera h Panan	Perma salaha n yang Dihad api																		
						5	6	7	7.a			7.b						IV	12=8+9+10+11	13=12/7*100	13a									14=6+12	15=11/5*100%																
												RENJA		DPA		DPA-P																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)	Anggaran(%)	K	RP	K	Rp	K(%)	Anggaran(%)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp																														
1	2	2a	3	4	4a	5		6		7	7.a	RENJA		DPA		DPA-P		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)	Anggaran(%)	K	RP	K	Rp	K(%)	Anggaran(%)	20	21												
			Mewujudkan tata kelola sektor pertambangan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice)	Persentase pelaku usaha yang pertambangan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik		45,00				Persentase pelaku usaha yang pertambangan yang melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik	%	45		45		57		57		57,00		100,00				ST	SR																				
			Sasaran	Indikator Sasaran						Indikator Sasaran																	SR	SR																			
			Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha Pertambangan terhadap kewajiban administrasi dan teknis	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis		45				Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	45		45		57		57		57		100,00				ST	SR																				
			Meningkatnya PAD Sektor Pertambangan Mineral	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau		228,6				Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	228,60		228,60		228,60									0,00		SR	SR																			
		3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	282,84	2.413.627.000	174,59	180.064.700	Penerimaan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Sektor Pertambangan Mineral di Provinsi Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	228,60	2.000.000.000	228,60	1.144.618.300	228,60	620.047.000	###	344.805.600	228,60	606.354.000	100,00	97,79	ST	ST	403	786.418.700	142,55	32,58																		
				Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	50				Persentase pelaku usaha yang taat terhadap kewajiban administrasi dan teknis	%	45		45		57		57		57		100,00			ST		57	-	114,00	#DIV/0!																	
		3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat, Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	7	538.000.000	4		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pertambangan Rakyat, Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	3	150.000.000	4	40.107.700	1	-	1		1	-	100,00	0,00	ST	SR	5	-	71,43	0,00																		
		3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	12	238.000.000	4		Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	4	50.000.000	4	40.107.700	1		1		1	-	100,00	0	ST	SR	5	-	41,67	0,00																		
		3.29.03.1.04.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan	8	200.000.000			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan	4	50.000.000												SR	SR																					
		3.29.03.1.04.0006	Pencatatan dan Pengumpulan luran Pertambangan Rakyat	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan luran Pertambangan Rakyat	Laporan	2	100.000.000			Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan luran Pertambangan Rakyat		1	50.000.000												SR	SR																					
		3.29.03.1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	5	305.000.000	4		Jumlah Laporan Penatausahaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	2	125.000.000	2	42.091.700	1	-	1		1	-	100,00	0,00	ST	SR	5	-	100,00	0,00																		
		3.29.03.1.12.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	3	155.000.000	4		Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	1	50.000.000	1	42.091.700	1		1		1	-	100,00	0,00	ST	SR	5	-	166,67	0,00																		
		3.29.03.1.12.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	8	150.000.000			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	4	75.000.000												SR	SR																					

No	Tujuan/ Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan pada Tahun 2024-2026		Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2024 (n-1)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) Renja 2025	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025						Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)	Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025 (n)	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (n)	Unit Peran gkat Daera h Panan	Perma salaha n yang Dihad apl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						5					6		7		7.a										7.b		7.c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

No	Tujuan/ Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan pada Tahun 2024-2026		Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2024 (n -1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) Renja 2025	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025						Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dielevaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)	Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025 (n)		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (n)		Unit Peran gkat Daera h Panah	Perma salaha n yang Dihad api			
						5	6	7	7.a			7.b			IV 11	12=8+9+10+11	13=12/7*100					13a	14=6+12	15=11/5*100%						
												RENJA	DPA	DPA-P											K			Rp	K	Rp
1	2	2a	3	4	4a	5		6		7	7.a	7.b			IV 11	12=8+9+10+11	13=12/7*100	13a	14=6+12	15=11/5*100%			20	21						
						K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K(%)	Anggaran(%)	K	RP	K	Rp	K(%)	Anggaran(%)			
		3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Dokumen	4	260.000.000			Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Dokumen	1	80.000.000			-						SR	SR							
		3.29.05.1.05.0001	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen	2	160.000.000			Jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen	1	80.000.000									SR	SR							
		3.29.05.1.05.0002	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen	2	100.000.000			Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen											SR	SR							
		3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Laporan	2	100.000.000			Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Laporan	-			-							SR	SR							
		3.29.05.1.06.0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan	2	100.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan											SR	SR							
		3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	%	15,83	27.176.481.972	15,43		Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	%	15,42	9.235.539.759	15,42	16.101.750.000	15,42	25.589.819.624	###	4.785.178.040	15	18.123.254.494	100,00	70,82	ST	S	30,85	18.123.254.494	194,88	66,69	
		3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	8	200.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	4	100.000.000									SR	SR							
		3.29.05.1.07.0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan	8	500.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan	4	115.759.300									SR	SR							
		3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Unit	6	2.100.000.000			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Unit											SR	SR							
		3.29.05.1.07.0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen	8	350.000.000			Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen	4	100.000.000									SR	SR							
		3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	655	18.324.825.618	230		Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Unit	289	7.969.780.459	554	16.101.750.000.00	712	24.234.413.050.00	56	4.785.178.040	723	16.859.755.920	101,54	69,57	ST	S	953	16.859.755.920	145,50	92,01	
		3.29.05.1.07.0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Jumlah personil yang dibayai untuk mengoperasikan infrastruktur aneka EBT	Orang	40	1.300.000.000			Jumlah personil yang dibayai untuk mengoperasikan infrastruktur aneka EBT	Orang																			
		3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	Unit	17	4.100.000.000	1		Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	Unit	4	950.000.000			1	1.355.406.574				1	1.263.498.574	100,00	93,22	ST	ST	2	1.263.498.574	11,76	30,82
		3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen	12	301.656.354			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen											SR	SR							
		3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Laporan	4	200.000.000			Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Laporan	-			-							SR	SR							
		3.29.05.1.08.0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	2	100.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan											SR	SR							
		3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	2	100.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan											SR	SR							
		3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Laporan	9	1.050.000.000	4		Terlaksananya Bauran peresentase kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi (energi mix)	Laporan	2	232.832.600	2	332.744.500	1	309.232.400	1	51.493.800	1	105.925.000	100,00	34,25	ST	SR	5	105.925.000	55,56	10,09	
		3.29.05.1.10.0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	2	100.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan											SR	SR							
		3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	2	100.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan											SR	SR							
		3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Laporan	2	250.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Laporan	1	117.202.500									SR	SR							
		3.29.05.1.10.0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	3	600.000.000	4		Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	1	115.630.100	1	332.744.500	1	309.232.400	1	51.493.800	1	105.925.000	100,00	34,25	ST	SR	5	105.925.000	166,67	17,65	
	Tujuan			Indikator Tujuan																		SR	SR							
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat			Rasio Elektrifikasi	%	99,20						%	98,80		98,80		98,80	###		99			ST	SR	99	-	99,60	#DIV/0!		
	Sasaran			Indikator Sasaran																		SR	SR							
	Meningkatnya desa/kelurahan dan rumah tangga berlistrik			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	100						%	100		100		100		100		99,76		ST	SR	100	-	99,76	#DIV/0!		
				Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	99,2						%	100		100		100	###		100			ST	SR	100	-	100,81	#DIV/0!		

No	Tujuan/ Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan pada Tahun 2024-2026		Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2024 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) Renja 2025	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025						Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025 (n)		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (n)		Unit Peran gkat Daera h Panan	Perma salaha n yang Dihad apl										
						5	Rp	6	K			Rp	7	7.b						IV		12=8+9+10+11		13=12/7*100		13a				14=6+12		15=11/5*100%							
														RENJA		DPA				DPA-P		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K(%)	Anggaran(%)	K	RP	K	Rp	K(%)	Anggaran(%)
														K	Rp	K	Rp			K	Rp																		
1	2	2a	3	4	4a					7	7.a																						20	21					
		3.29.06.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modat Dalam Negeri	Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	Rekomendas	30	960.000.000	100	123.578.066	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Rekomendasi	10	250.000.000	5	35.584.000	1	14.434.000	1		1	11.364.200	100,00	78,73	ST	T	100	134.942.266	333,33	14,06										
		3.29.06.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	12	460.000.000	6	54.511.900	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	4	100.000.000	1	16.921.000	1	6.221.000	1	-	1	3.889.300	100,00	62,52	ST	R	7	58.401.200	58,33	12,70										
		3.29.06.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	12	500.000.000	6	69.066.166	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	4	150.000.000	1	18.663.000	1	8.213.000	1	-	1	7.474.900	100,00	91,01	ST	ST	7	76.541.066	58,33	15,31										
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terpenuhinya Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau	%	100	42.239.630.172	100	18.016.918.686	Persentase Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau	%	100	14.923.474.898	100	345.253.310	100	6.991.197.319	362.357.700	50,00	6.779.075.916	50,00	96,97	SR	ST	100	24.795.994.602	100,00	58,70											
		3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	2270	6.955.200.000	1587	4.497.236.040	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	760	2.560.000.000	35	150.000.000	73	313.944.400	38	214.829.000	73	225.570.200	100,00	71,85	ST	S	1660	4.722.806.240	73,13	67,90										
		3.29.06.1.06.0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah dokumen Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	12	500.000.000	8	119.976.500	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	4	500.000.000	1	17.046.000	1	9.809.000	1	1.843.900	1	6.708.900	100,00	68,40	ST	S	9	126.685.400	75,00	25,34										
		3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	60	34.134.430.172	172	13.248.425.562	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	24	11.713.474.898	3	163.358.310	3	6.632.649.719	3	114.693.400.00	3	6.515.805.416	100,00	98,24	ST	ST	175	19.764.230.978	291,67	57,90										

No	Tujuan/ Sasaran Renstra	Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perubahan pada Tahun 2024-2026		Realisasi capaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2024 (n-1)		Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) Renja 2025	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2025						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (n)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realissasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) (n)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025 (n)		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024 (n)		Unit Peran gkat Daera h Panan	Perma salaha n yang Dihad apl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						5	6	7	7.a			7.b						IV	12=8+9+10+11	13=12/7*100	13	13a	14=6+12		15=11/5*100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												RENJA		DPA		DPA-P							11		12		14		15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			RP	K	Rp	K	Anggaran(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	2a	3	4	4a					7	7.a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Disusun,
Tanjungpinang, Januari 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. M. DARWIN, MT
NIP. 197303330 199302 1 001